

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sudah merupakan salah satu hal umum yang bisa dilihat pada saat ini di hampir semua daerah dan kota yang ada di Indonesia. Adanya pembangunan di setiap lokasi tersebut, masyarakat juga bisa menikmati kesetaraan dalam aspek sosial maupun dalam aspek ekonomi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Konsep pembangunan yang ideal dari setiap lokasi di Indonesia tentu saja mengharuskan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (satu) dan tingkat II (dua) untuk melakukan penganggaran sejumlah dana untuk menunjang atau bahkan meningkatkan standar mutu dari fasilitas-fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 diganti menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (PEMDA) dikarenakan memiliki kewenangan

lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. (Firly, 2013)

Otonomi daerah dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah adalah fasilitas, pemerintah harus kreatif, politik lokal yang stabil, jaminan kesinambungan berusaha, komunikatif, yang utama bagi pembangunan daerah adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat dan pada akhirnya akan mempengaruhi pajak. Jika daya beli meningkat, pajak yang dihasilkan meningkat, maka juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Syaukani, 2002)

Setelah diperlakukannya otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur terpenting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan mencerminkan otonomi daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. (Halim, 2007)

Mardiasmo (2002) menyatakan masih banyak peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dikaji secara hati-hati. Salah satu peraturan itu adalah peraturan tentang keuangan daerah, yang mengatur tentang APBD yang merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah untuk

meningkatkan efisien dan efektifitasnya dalam mendorong proses pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan berupa PAD untuk membiayai daerahnya. Untuk meningkatkan PAD pemerintah perlu mendukung usaha rakyat. Dari usaha rakyat tersebut akan menghasilkan pajak dan retribusi, dari pajak dan retribusi yang dihasilkan akan meningkatkan PAD. Untuk mengembangkan usaha rakyat dibutuhkan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang diberikan yaitu tidak mempersulit dalam pengurusan pendirian usaha.

Perencanaan pembangunan daerah diawali dengan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Perencanaan anggaran daerah tersebut merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan peningkatan pelayanan publik tanpa diimbangi dengan kinerja keuangan pemerintah yang baik, tidak mungkin tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Langkah yang harus

digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah mengoptimalkan PAD dengan cara menghitung potensi PAD secara sistematis. (Halim, 2007)

Dengan pengelolaan keuangan yang baik sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik pada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan PAD. PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per-kapita. PDRB merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai PDRB yang tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah tersebut semakin baik.

Selain itu, penduduk juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduknya. Karena jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan yang penting dalam menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Sebagai akibat dari fungsinya ini maka penduduk bukan saja merupakan unsur yang menciptakan dan mengembangkan teknologi dan mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. (Sukirno, 1978)

Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku Kota
Surakarta Tahun 1990-2013 (dalam juta rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Tahun	Harga Berlaku
1990	640,738,979	2002	3,703,510,330
1991	741,040,442	2003	4,177,490,975
1992	860,119,797	2004	4,756,559,952
1993	988,916,426	2005	5,585,766,778
1994	1,143,122,481	2006	6,179,011,255
1995	1,331,166,129	2007	6,909,094,570
1996	1,597,183,004	2008	7,901,886,060
1997	1,725,142,586	2009	8,880,691,240
1998	2,220,348,200	2010	9,941,136,560
1999	2,545,175,030	2011	10,992,971,190
2000	2,965,128,910	2012	12,180,558,650
2001	3,321,685,630	2013	13,558,966,520

Sumber: BPS Kota Surakarta

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku, Kota Surakarta Tahun 1990-2013 pada tabel 1.1 dapat dilihat

bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta baik sebelum krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, saat krisis ekonomi tahun 1997 maupun sesudah krisis ekonomi tahun 1997 tetap mengalami peningkatan meskipun besarnya bervariasi. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tetap dapat bertahan walapun adanya krisis ekonomi global. Dan berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas cukup menarik untuk diteliti, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang mengambil judul: ***“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta.”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta Tahun 1990-2013 yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
4. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pihak yang memerlukan, terutama pemerintah Kota Surakarta dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan data bagi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini merupakan salah satu proses aplikasi dari teori-teori ekonomi yang telah diterima penulis selama studi.

E. Metodologi Penelitian

1. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dengan rentang waktu 23 tahun yaitu dari tahun 1990-2013 yang meliputi: data pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Surakarta, data jumlah penduduk Kota Surakarta, dan data pengeluaran pemerintah Kota Surakarta.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta. Dan data yang bersumber dari buku literatur, jurnal penelitian, dan studi pustaka lain yang mendukung penelitian ini.

2. Metode dan Alat Analisis

Untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB, digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) di model penelitian ini di formulasikan hubungan atau fungsi sebagai berikut:

$$\log Y_t = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1t} + \beta_2 \log X_{2t} + \beta_3 \log X_{3t} + \beta_4 \log X_{4t} + U_t$$

Keterangan :

Y = Produk Domestik Regional Bruto

β_0 = Intercept atau konstanta

X_1 = Penerimaan pajak daerah

X_2 = Penerimaan retribusi daerah

X_3 = Jumlah penduduk

X_4 = Pengeluaran pemerintah

β_1 = Koefisien regresi penerimaan pajak daerah

β_2 = Koefisien regresi penerimaan retribusi daerah

β_3 = Koefisien regresi jumlah penduduk

β_4 = Koefisien pengeluaran pemerintah

U_t = Variabel pengganggu

3. Uji Ekonometrik

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Gujarati (2003) Asumsi normalitas gangguan U_t adalah asumsi untuk mengetahui validitas pengaruh variabel independen itu sendiri. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa Uji t dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai

residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel penjelas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui terjadi tidaknya korelasi diantara variabel independen dalam proses regresi. Jika dalam model terdapat multikolinieritas maka model tersebut memiliki kesalahan standart yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi.

3. Uji Heteroskedastisitas (Uji White)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian dari *error* konstan atau tidak, selain itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi (Uji Breusch GoodFrey)

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistic melalui Uji Durbin-Watson (DW test). (Ghozali, 2006)

5. Uji Spesifikasi Model (Ramsey Reset Test)

Menurut Gujarati (2003) Uji spesifikasi model adalah pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model, dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan uji Ramsey-Reset yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan, spesifikasi umum atau *general test of specification error*.

4. Uji Statistik

a. Uji t

Uji statistik adalah pengujian terhadap variabel-variabel penjelas secara individu. Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan, jika asumsi normalitas error yaitu terpenuhi, maka kita dapat menggunakan uji t untuk menguji koefisien

parsial dari regresi. Bertujuan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

b. Uji F

Uji F adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) secara keseluruhan terhadap variabel (*dependent*). Bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya.

c. Uji R^2

Koefisien determinasi *Adjusted* R^2 adalah sebuah fungsi yang tidak pernah menurun dan jumlah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi. Koefisien *Adjusted* R^2 dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang peran dan fungsi PDRB dalam penentuan pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, tujauan terhadap penelitian-penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan ruang lingkup penelitian, teknik analisis data, jenis dan sumber data

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Menguraikan tentang deskripsi data PDRB Kota Surakarta, pembahasan dan hasil analisis yang meliputi variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan intrepretasi hasil.

Bab V Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran.